



EDISI RABU 15 JULI 2022

LEN

Inspirasi Perubahan



Terjebak 11 Jam, Truk Alat Berat Tabrak JPO Tendea

PETUGAS gabungan mengevakuasi truk pengangkut alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendea, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2022). Proses evakuasi berlangsung lebih dari 11 jam sejak insiden terjadi sekitar pukul 00.30 WIB dengan mengerahkan truk crane untuk mengangkat struktur JPO yang bergeser akibat benturan. Setelah badan truk berhasil dikeluarkan, petugas melanjutkan pembongkaran JPO yang mengalami kerusakan parah demi mengamankan lokasi dan mempercepat pemulihan arus lalu lintas di Jalan Kapten Tendea. (lscn)

KRONOLOGI KONTROVERSI GUS MIFTAH

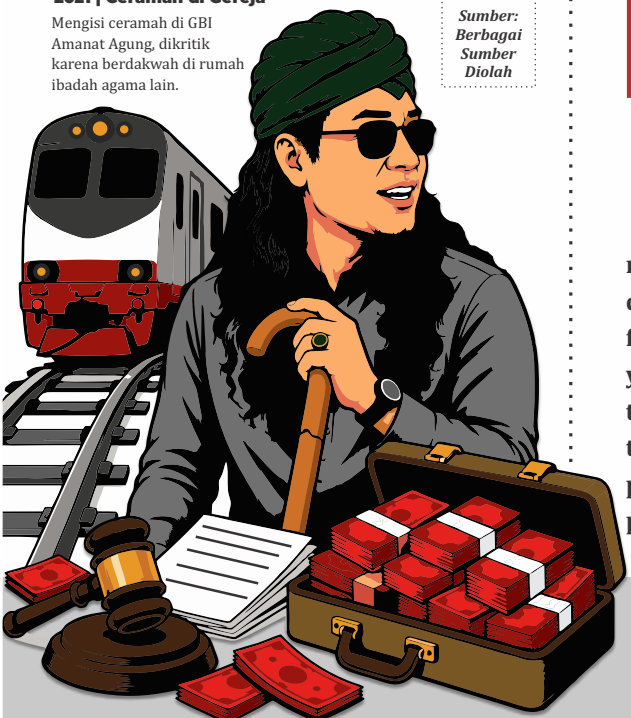
2018 | Dakwah di Klub Malam

Viral menggelar pengajian di klub malam di Bali, memicu pro-kontra.

2021 | Ceramah di Gereja

Mengisi ceramah di GBI Amanat Agung, dikritik karena berdakwah di rumah ibadah agama lain.

Sumber:
Berbagai
Sumber
Diolah



NAMA GUS MIFTAH DI KORUPSI JALUR KERETA

Fakta baru terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek jalur ganda kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Nama pendakwah Gus Miftah disebut dalam sidang setelah jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat dugaan aliran dana Rp100 juta dari proyek tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami fakta yang terungkap di persidangan dan membuka kemungkinan memeriksa pihak-pihak yang namanya disebut apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, terdakwa Bupati Pati nonaktif Sudewo mengaku tidak mengetahui dugaan aliran dana tersebut. Perkara yang disidangkan merupakan bagian dari pengembangan kasus korupsi proyek perkeretaapian DJKA, dengan Sudewo didakwa menerima fee 0,5 persen dari proyek pembangunan jalur ganda Solo-Semarang senilai sekitar Rp143 miliar. BACA HAL 11...

2022 | Wayang & Yati Pesek

Wayang di ponpes diduga menyindir Khalid Basalamah, serta mengolok Yati Pesek.

Awal 2024 | PKS & Bagi Uang

Menyebut PKS sebagai partai Wahabi dan viral membagikan uang saat pengajian di Madura.

Akhir 2024 | Toyor Istri & Pedagang Es Teh

Menyor kepala istri di depan umum dan menghina pedagang es teh. Dampaknya, mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden.

PATRIOT BOND DIGUGAT KE MK, PURBAYA PASANG BADAN

Kebijakan instrumen obligasi khusus Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yakni Patriot Bond dan Merah Putih Bond, kini tengah menghadapi badai ujian di Mahkamah Konstitusi (MK). Jaminan perlindungan hukum bagi para investor kakap yang membeli instrumen ini digugat karena dinilai memicu kekebalan hukum (impunity) dan berisiko menyuburkan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Meskipun menuai kritik tajam dari berbagai koalisi masyarakat sipil dan ahli hukum, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih pasang badan. Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mundur satu langkah pun dalam mempertahankan kebijakan ini.

Guna menghadapi sidang-sidang krusial di MK, bendahara negara ini mengonfirmasi telah menyiapkan strategi matang serta mengutus tim ahli hukum terbaik untuk beradu argumen di meja hijau konstitusi.

Gugatan uji materiil (judicial review) ini secara resmi terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 253/PUU-XXIV/2026. Gugatan tersebut dilayangkan oleh seorang advokat bernama Muhammad Hafidz, serta didukung oleh gerakan moral dari Koalisi Anti-Pencucian Uang Danantara dan tokoh nasional seperti mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2010, Muhammad Busyro Muqoddas.

Fokus keberatan para penggugat tertuju pada ketentuan di dalam Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Bunyi lengkap dari Pasal 50A ayat (5) UU P2SK tersebut adalah: "Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata."

Menurut para pemohon, frasa tersebut merupakan "karpet merah" yang sangat berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia.

Muhammad Busyro Muqoddas menyebutkan bahwa regulasi ini memberikan proteksi hukum yang terlampaui berlebihan kepada para wajib pajak atau investor besar, yang berpotensi mencederai asas transparansi keuangan.

"Aturan ini berpotensi mengurangi akuntabilitas dan mempersempit ruang penegakan hukum terhadap dana atau transaksi yang berasal dari tindak pidana yang masuk ke sistem keuangan Indonesia," ujar Busyro dalam keterangan resminya.

Senada dengan Busyro, Kuasa



Hukum Para Pemohon, Muhamad Saleh, menilai pasal tersebut telah mencoreng asas kesetaraan di mata hukum (equality before the law) yang dijunjung tinggi oleh UUD 1945.

"Melalui Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) UU P2SK, negara justru melarang penegak hukum menggunakan data transaksi sebagai alat bukti di pengadilan, melarang otoritas pajak menjadikannya dasar pengenaan pajak, bahkan memberikan perlindungan dari tuntutan pidana dan gugatan perdata. Norma seperti ini tidak hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip equality before the law, due process of law, dan negara hukum yang dijamin UUD 1945. Tidak boleh ada satu kelompok warga negara yang memperoleh perlakuan lebih tinggi daripada hukum itu sendiri," tegas Saleh secara lugas.

Di tengah serangan bertubi-tubi terhadap legalitas aturan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampil ke depan untuk membela kebijakan ini. Menurut Purbaya, publik tidak boleh melihat aturan perlindungan ini secara sempit.

Purbaya meluruskan bahwa jaminan hukum tersebut tidak berarti memberikan kekebalan hukum absolut kepada pribadi sang investor atas segala kejahatan yang dilakukannya di luar investasi tersebut. Proteksi hukum hanya berlaku secara spesifik terhadap penempatan dana mereka pada obligasi khusus ini.

Purbaya membeberkan kalkulasi ekonomi makro yang pragmatis di balik lahirnya kebijakan kontroversial ini. Bagi pemerintah, memulangkan aset-aset raksasa milik

konglomerat Indonesia yang selama ini "parkir" atau disembunyikan di luar negeri (flight capital) jauh lebih mendesak demi menggerakkan roda ekonomi nasional dan membiayai pembangunan infrastruktur jangka panjang.

"Daripada uangnya di luar (negeri) terus. Biar dia masuk ke sistem, memang ada ruginya sedikit. Tapi menurut saya sih uangnya masuk ke ekonomi kita," jelas Purbaya saat memberikan keterangan resmi.

Kebutuhan pendanaan ini memang sangat nyata. Instrumen Patriot Bond dirancang khusus untuk membidik dana para pengusaha besar dalam mendanai proyek ramah lingkungan berbasis pemrosesan sampah menjadi energi (waste-to-energy). BPI Danantara sendiri mengklaim telah sukses meraup dana segar hingga Rp50 triliun pada Oktober 2025 dari hasil penjualan Patriot Bond.

Sementara itu, instrumen pendampingnya, Merah Putih Bond, disiapkan sebagai sumber pendanaan jangka panjang alternatif untuk mempercepat penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan likuiditas jumbo tanpa harus terus-menerus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Utus Ahli Hukum Terbaik

menegaskan kesiapannya untuk bertarung argumen di persidangan Mahkamah Konstitusi. Purbaya menyatakan kementerannya telah meramu strategi khusus dan mengumpulkan pakar-pakar hukum tata negara serta keuangan terbaik untuk mematahkan dalil-dalil para

MODAL JUMBO DARI PARA TAIKAN UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Dana Terkumpul

- Total dana dihimpun: Rp68,38 triliun.
- Berasal dari penerbitan Patriot Bond oleh BPI Danantara.
- Mekanisme: private placement (penawaran terbatas).

Tahapan Penghimpunan Dana

- Tahap I (September–Oktober 2025)
 - Dana terkumpul: Rp50 triliun
 - Dibeli sekitar 46 konglomerat nasional
- Tahap II (November–Desember 2025)
 - Tambahan dana:
 - Rp12,6 triliun
 - Rp11 triliun melalui opsi oversubscription

Dana Patriot Bond Digunakan Untuk

- Proyek transisi energi berkelanjutan
- Pengembangan fasilitas waste to energy (sampah menjadi energi listrik)
- Pembiayaan proyek strategis nasional



penggugat.

Saat ditemui oleh awak media di Kompleks Parlemen Senayan setelah menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengenai laporan pertanggungjawaban APBN, Purbaya menyampaikan optimismenya.

"Kita lihat saja bagaimana hasil gugatannya. Biar saja, kita serahkan ke MK. Kita lihat hasilnya seperti apa," kata Purbaya tenang.

Ia menekankan bahwa langkah hukum yang disiapkannya bertujuan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kebijakan penarikan modal asing/domestik lewat obligasi khusus ini sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

"Strategi, saya berdoa, saya kirim orang-orang, kirim ahli-ahli hukum yang betul untuk memastikan bahwa kebijakan kita bisa kita pertahankan dan kita pertanggungjawabkan ke masyarakat di mata hukum," ucap Purbaya mantap.

Langkah Purbaya mengawal kebijakan ini dipastikan tidak akan mudah. Dalam sidang pendahuluan yang digelar di MK, Hakim Konstitusi Arsul Sani secara terbuka memperingatkan risiko hukum yang membayangi berlakunya Pasal 50A UU P2SK ini. Arsul menyarankan agar pemohon memperkuat argumen mereka dengan menyoroti potensi tabrakan aturan (conflicting of rule) antara UU P2SK dengan komitmen pemberantasan pencucian uang di Indonesia.(wid ist/dya)

KOMISI VIII DPR SETUJUI PENCAIRAN RP4 T UNTUK DP HAJI 2027

Komisi VIII DPR RI menyetujui pencairan uang muka penyelenggaraan ibadah haji 2027 sebesar Rp4.007.471.080.797 atau sekitar Rp4 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk down payment (DP) atau uang muka untuk mengamankan pemesanan tenda jemaah, paket layanan dasar, serta kebutuhan visa calon jemaah haji Indonesia.

Persetujuan itu diberikan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, serta rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang membacakan kesimpulan rapat yang menyatakan parlemen menyetujui kebutuhan transfer uang muka untuk biaya layanan haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi.

"Komisi VIII DPR RI menyetujui kebutuhan transfer uang muka terkait biaya tenda sebesar sejumlah 858.743.189 Riyal Arab Saudi dan 64 halalah. Ekuivalen dengan Rp4.007.471.080.797," ujar Marwan.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan menjelaskan pemerintah membutuhkan pencairan dana tersebut bukan sekadar untuk mempercepat administrasi, tetapi untuk memastikan Indonesia tetap mendapatkan layanan terbaik di tengah perubahan sistem penyelenggaraan haji yang diterapkan Arab Saudi.

Menurut dia, persaingan antarnegara dalam mendapatkan layanan strategis di Tanah Suci semakin meningkat setelah Arab Saudi menerapkan mekanisme baru berbasis digital dengan jadwal



Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di kawasan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, beberapa waktu lalu.

konfirmasi kontrak yang lebih ketat.

"Uang muka tersebut pada prinsipnya akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam permintaan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berikutnya, sehingga tidak menambah besaran kebutuhan pendanaan secara keseluruhan," kata Irfan.

Kejar Posisi Tenda Terbaik di Armuzna

Gus Irfan menjelaskan tahapan persiapan haji 2027 telah memasuki fase penting. Pemerintah Arab Saudi menetapkan periode konfirmasi kontrak layanan mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026.

Dalam periode tersebut, Indonesia harus memastikan keberlanjutan pemesanan tenda yang digunakan pada musim haji sebelumnya agar tetap dapat digunakan pada musim haji 1448 Hijriah.

"Time line persiapan penyelenggaraan haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi dimulai tanggal 1 Safar atau 15 Juli sampai tanggal 13 Agustus 2026. Berakhirnya periode konfirmasi untuk mempertahankan tenda-tenda yang telah dipesan pada musim haji 1447 Hijriah oleh Kantor Urusan Haji untuk digunakan pada musim haji 1448 Hijriah melalui kontrak awal untuk paket layanan lengkap dengan

RINCIAN UANG MUKA HAJI 2027

TOTAL
Rp 4,007 Triliun

Pemesanan Tenda Haji

Rp 808,3 Miliar

- Pembayaran awal tenda jemaah.
- Mengamankan lokasi strategis di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).

Paket Layanan Dasar & Visa

Rp3,199 Triliun

- Pembayaran layanan dasar (syarikah) bagi jemaah.
- Mencakup pengurusan visa dan operasional di Tanah Suci.

Total Peruntukan

- Tenda: **Rp808,3 miliar**
- Layanan dasar & visa: **Rp3,199 triliun**
- Total: **Rp4,007 triliun**

syarikah penyedia layanan," ujar Gus Irfan.

Pemerintah menilai pembayaran lebih awal akan memberi keuntungan strategis bagi Indonesia. Negara yang lebih cepat melakukan konfirmasi kontrak berpeluang mempertahankan lokasi tenda yang lebih strategis, terutama di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang menjadi pusat aktivitas puncak ibadah haji.

"Percepatan pembayaran uang muka ini juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mendapatkan posisi penempatan tenda jemaah yang lebih strategis, apabila ada negara lain yang terlambat melakukan konfirmasi," kata Gus Irfan.

Posisi tenda menjadi salah satu faktor penting dalam kenyamanan jemaah karena berkaitan dengan jarak tempuh, kepadatan pergerakan jutaan manusia, hingga kelancaran mobilisasi selama rangkaian ibadah Masyair.

Kementerian Haji dan Umrah telah menyampaikan surat permohonan transfer biaya tenda dan paket layanan dasar melalui Kantor Urusan Haji Republik Indonesia.

Surat bernomor 370/S/08/UH/VIII/2026 tertanggal 5 Juli 2026 itu memuat estimasi kebutuhan dana sebesar 858.743.189 riyal Arab Saudi dan 64 halalah.

Dengan asumsi kurs satu riyal Arab Saudi sebesar Rp4.666,67, nilai tersebut setara dengan Rp4.007.471.880.797 dan 299 sen.

Gus Irfan merinci, dari total kebutuhan tersebut, biaya tenda mencapai 173.207.789 riyal Arab Saudi dan 64 halalah atau sekitar Rp808.303.595.679.

Sementara itu, paket layanan dasar dan visa membutuhkan anggaran sebesar 685.535.400 riyal Arab Saudi atau sekitar Rp3.199.167.485.118. (tin,ist,ant/dya)

Biaya Naik Rp19,9 Juta, Pemerintah Upayakan Tak Beban Jemaah

BIAYA Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 diusulkan naik hampir Rp20 juta per jemaah. Kementerian Haji dan Umrah mengajukan biaya haji tahun 1448 Hijriah sebesar Rp107,34 juta per jemaah, meningkat Rp19,93 juta dibandingkan usulan sebelumnya.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, kenaikan tersebut tidak terlepas dari tekanan ekonomi global yang berdampak terhadap komponen penyelenggaraan haji.

Salah satunya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta kenaikan harga minyak dunia yang memengaruhi biaya

penerbangan.

"Tekanan global luar biasa, baik dolar maupun harga minyak yang berdampak langsung dengan penerbangan kita," ujar Gus Irfan.

Meski total biaya penyelenggaraan meningkat, pemerintah berupaya agar kenaikan tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada jemaah. Gus Irfan menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan terkait potensi kenaikan biaya haji dan meminta agar pemerintah mencari solusi yang tidak memberatkan calon jemaah.

"Apa pun yang terjadi, usahakan tidak membebani jemaah," kata Gus Irfan menyampaikan arahan

Presiden.

Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan skema pembiayaan dengan memanfaatkan nilai manfaat pengelolaan dana haji. Dalam rancangan tersebut, sekitar 60 persen biaya haji akan berasal dari nilai manfaat, sedangkan 40 persen sisanya dibayarkan jemaah melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Dengan skema itu, pemerintah berharap kenaikan BPIH tidak berbanding lurus dengan kenaikan setoran yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah. Pembahasan terkait besaran final biaya haji 2027 masih akan dilanjutkan bersama DPR. (wisld,ist/dya)

SINYAL GEJOLAK PANGAN MUNCUL: HARGA BERAS-MINYAK TINGGI

Harga beras di tingkat konsumen masih bertahan tinggi. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut salah satu penyebab utamanya adalah tingginya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang kini berada di atas asumsi pemerintah. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan pemerintah untuk tetap mewaspadai harga beras dan minyak goreng yang masih tinggi di tingkat konsumen.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan harga beras sangat berkaitan dengan harga gabah yang menjadi bahan baku utama. Saat ini, rata-rata harga GKP di tingkat petani berada pada kisaran Rp7.000 hingga Rp7.500 per kilogram (kg).

Menurut Ketut, kondisi tersebut membuat harga beras sulit ditekan lebih rendah karena asumsi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebelumnya menggunakan perhitungan harga gabah sebesar Rp6.500 per kg.

"Tentu kalau GKP-nya tinggi, di atas Rp7.000 tentu harga beras kan tidak mungkin (murah) di tingkat eceran. Karena kita membuat asumsi harga eceran tertinggi itu dengan GKP Rp6.500. Nah, kalau GKP-nya lebih dari Rp6.500 tentu tidak akan bisa sesuai dengan harga eceran, apalagi di atas Rp7.000," ujar Ketut saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).

Meski menjadi salah satu faktor yang membuat harga beras naik, Ketut menilai tingginya harga gabah memiliki sisi positif bagi sektor pertanian. Menurut dia, harga yang lebih baik membuat petani mendapatkan keuntungan lebih layak dan dapat mendorong produksi pangan nasional.

"Nah, kalau kita ingin menjadi negara produsen, ingin swasembada, tentu ini sisi positif. Kenapa? Karena harganya nyaman bagi petani kita, nyaman bagi petani kita untuk berproduksi," jelasnya.

Capai Rp15.499 per Kg

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras nasional masih berada pada level tinggi hingga pekan kedua Juli 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widayanti mengatakan harga beras dan minyak goreng masih menjadi perhatian pemerintah meskipun perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) relatif rendah.

"Beras, minyak goreng perlu mendapatkan perhatian walaupun perubahan IPH-nya relatif rendah, tetapi level harganya sudah sangat tinggi. Ini yang sebenarnya dibayar oleh masyarakat. Walaupun IPH-nya rendah, artinya harganya stabil, tetapi stabil pada harga yang tinggi," kata Amalia dalam Rapat Koordinasi



(Ilustrasi) BPS mencatat harga beras secara nasional mencapai Rp15.499 per kg. Kenaikan harga terjadi di 128 kabupaten/kota. (dok.ist)

Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (13/7/2026).

BPS mencatat harga beras secara nasional mencapai Rp15.499 per kg. Kenaikan harga terjadi di 128 kabupaten/kota hingga pekan kedua Juli 2026, meningkat dibandingkan pekan pertama Juli. Selain itu, kenaikan harga beras tercatat terjadi di 29 provinsi.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan sejumlah intervensi, termasuk penyaluran bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Ketut mengatakan bantuan pangan tahap kedua akan diberikan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Bantuan pangan bagi 33,24 juta, kalau satu keluarga ada tiga orang saja, kali tiga kan sekitar 60 lebih atau 70 juta lebih sudah kita bantu, 90 juta sekian orang sudah dibantu dengan bantuan pangan. Itu sudah meringankan masyarakat kita yang membutuhkan," ujar Ketut.

Ia optimistis program tersebut dapat mengurangi tekanan permintaan beras di pasar sehingga membantu mengendalikan inflasi.

Menurut dia, penyaluran bantuan pangan yang dijadwalkan mulai Agustus akan membuat sebagian kebutuhan masyarakat terpenuhi sehingga pembelian beras di pasar dapat berkurang.

"Kalau sudah turun di bulan Agustus tentu bayangkan saja 33 (penerima manfaat) kali tiga (orang), berarti 1.000.000 beras langsung diterima di konsumen. Tentu

kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi," jelasnya.

Ketut menambahkan pemerintah juga mengandalkan sejumlah program lain untuk menjaga stabilitas harga, seperti SPHP dan gerakan pangan murah.

"Harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengendalikan," katanya.

Mendagri Akui Jadi Perhatian Pemerintah

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga mengungkapkan adanya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk beras, bawang putih, dan minyak goreng.

Menurut Tito, kenaikan komoditas tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong inflasi sehingga perlu penanganan bersama antar instansi.

"Ada kenaikan bawang putih, kemudian ada minyak goreng, sama beras, ada kenaikan sedikit. Itu yang saya sampaikan tadi kepada Menko (Airlangga Hartarto)," ujar Tito usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).

Tito mengatakan penanganan harga bawang putih dan minyak goreng menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Sementara untuk beras, pemerintah akan mempercepat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Bapanas.

"Kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang telah dikenakan juga harus cepat ditangani," paparnya.

PERBANDINGAN RATA-RATA HARGA BERAS BULANAN (2026)

Januari 2026

Rp15.013 per kg

Mei 2026

Rp15.350 - Rp15.400-an

Juni 2026

Rp15.444 per kg

Juli 2026 (Pekan II)

Rp15.499 per kg

5 PROVINSI DENGAN HARGA BERAS TERTINGGI



Kalimantan Tengah
Rp 19.550



Kalimantan Selatan
Rp 19.300



Papua
Rp 19.100



Sumatera Barat
Rp 17.800



Maluku Utara
Rp 17.650

(Sumber: BI/14 Juli 2026)

Ia juga meminta pemerintah daerah, khususnya wilayah dengan tingkat inflasi tinggi, segera memperkuat pasokan bahan pangan.

"Kalau saya sudah memberikan arahan kepada semua daerah, kalau target saya daerah-daerah yang tinggi-tinggi (inflasi), di daerah timur umumnya tinggi, di Aceh juga tinggi, langkah-langkahnya menambah suplai," kata Tito.

Menurut Tito, kendala distribusi akibat cuaca juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan di sejumlah wilayah.

"Juga ada masalah ombak untuk distribusi, gelombang di beberapa daerah tertentu menggunakan kapal yang lebih besar," ujarnya.

Meski terdapat tekanan dari sejumlah komoditas pangan, Tito memastikan inflasi nasional masih dalam kondisi terkendali. Inflasi tercatat berada di angka 3,34 persen, masih di bawah batas atas target nasional sebesar 3,5 persen.

"Inflasi kita di angka 3,34 persen relatif terkendali, masih di bawah target nasional yang maksimal 3,5 persen," kata Tito. (widist,rls/dya)

SUGIRI SANCOKO **DITUNTUT 7 TAHUN BUI**

Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko dituntut hukuman tujuh tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Sugiri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut selama menjabat sebagai kepala daerah.



Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko (kedua kanan) usai sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (14/7/2026). ANTARA

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa KPK Arjuna Budi Tambunan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (14/7/2026).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugiri Sancoko berupa pidana penjara selama 7 tahun dikurangi masa tahanan," kata Arjuna saat membacakan amar tuntutan.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Sugiri membayar denda sebesar Rp300 juta.

Apabila denda tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk mengganti pembayaran denda.

"Dan pidana denda sebesar Rp300 juta. Denda wajib dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap," ujar jaksa.

Selain hukuman badan dan denda, Sugiri juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp6.762.000.000.

Jaksa menyebut nilai tersebut berasal dari akumulasi penerimaan yang diduga diterima Sugiri melalui skema suap dan gratifikasi.

Dikatakan, Rp900 juta berasal dari suap Yunus Mahatma. Sementara Rp950 juta berasal dari

suap Sucipto. Dan Rp4,912 miliar berasal dari penerimaan gratifikasi.

Uang pengganti tersebut wajib dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila Sugiri tidak membayar uang pengganti tersebut, jaksa menyebut harta benda miliknya dapat disita dan dilelang. Jika hasil pelelangan tidak mencukupi, Sugiri akan dikenakan pidana tambahan berupa penjara selama tiga tahun.

Didakwa Melanggar Pasal Tipikor

Dalam tuntutanannya, JPU KPK menyatakan Sugiri terbukti melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa menjerat Sugiri dengan Pasal 12 huruf a dan huruf b juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, juncto ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, Sugiri juga didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor terkait penerimaan gratifikasi.

JPU KPK menilai perbuatan Sugiri merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut.

"Hal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b," ujar Arjuna.

Dua Terdakwa Lain Juga Dituntut

Dalam perkara yang sama, jaksa juga membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa lain, yakni mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Pramono dan Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo dr. Yunus Mahatma.

Agus dihukuman penjara 4 tahun 8 bulan dan bayar uang pengganti sebesar Rp975 juta.

Sementara Yunus Mahatma dituntut, Hukuman penjara 5 tahun 6 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp300 juta. Membayar denda sebesar Rp367 juta.

Jaksa juga menyebut barang bukti berupa uang senilai Rp500 juta yang ditemukan dalam perkara tersebut dirampas untuk dilelang.

"Barang bukti nomor 194 berupa uang senilai Rp500 juta, yang dimasukkan tas ponsel sejumlah Rp100 ribu berjumlah 5.000 lembar, dirampas untuk dilelang," kata anggota JPU KPK Tonny Indra dalam persidangan.

Berawal dari OTT KPK

Kasus yang menjerat Sugiri bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat malam, 7 November. Dalam operasi tersebut, sejumlah pihak turut diamankan dan kemudian ditetapkan sebagai bagian

FAKTA TERBARU KASUS SUGIRI SANCOKO

Tuntutan Jaksa KPK

- Penjara 7 tahun.
- Denda Rp300 juta (subsider 100 hari).
- Uang pengganti Rp6,78 miliar (subsider 3 tahun).

Konstruksi Kasus

- Berawal dari OTT KPK (November 2025) terkait jabatan Direktur RSUD dr. Harjono dan proyek Rp14 miliar.
- Diduga menerima Rp900 juta dalam jual beli jabatan.
- Didakwa menerima gratifikasi, termasuk sekitar Rp1,15 miliar dari kontraktor.

Persidangan

- Mengaku baru mengetahui kewajiban melapor gratifikasi saat diperiksa KPK.
- Kuasa hukum menyebut dana dipakai untuk kebutuhan darurat daerah, bukan kepentingan pribadi.
- Pihak terdakwa menilai tuntutan jaksa tidak objektif.

Terdakwa Lain

- Agus Pramono (eks Sekda Ponorogo): dituntut 4 tahun 8 bulan.
- dr. Yunus Mahatma (eks Direktur RSUD): dituntut 5 tahun 6 bulan.



dari perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto sebelumnya membenarkan kabar penangkapan Sugiri dalam OTT tersebut.

"Benar," ujar Fitroh saat dikonfirmasi terkait operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo.

Perkara ini kemudian bergulir hingga tahap persidangan dengan Sugiri sebagai terdakwa utama. Jaksa kini meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara serta kewajiban pembayaran denda dan uang pengganti miliaran rupiah atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi selama masa jabatannya sebagai kepala daerah periode 2021-2025. (wid,iat,kuk/dya)

Puluhan Jabatan Kosong Picu SiLPA Pemkot Malang Membengkak

MALANG - Puluhan jabatan yang masih kosong di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menjadi pemicu membengkaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari pos belanja pegawai. Pada Tahun Anggaran (TA) 2025, realisasi belanja pegawai hanya mencapai 89,78 persen, menyisakan anggaran sekitar Rp110 miliar yang tidak terserap.

"Realisasi belanja pegawai yang menyebabkan SiLPA itu memang bisa dianalogikan karena banyak jabatan kosong. Karena termasuk tunjangan jabatan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), juga tidak tersampaikan. Maka ini yang berpengaruh pada SiLPA," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Hendru Martono, Selasa (14/7/2026).

Dijelaskannya, selain jabatan kosong, faktor lain yang turut memengaruhi adalah adanya pegawai yang memasuki masa pensiun sehingga alokasi anggaran yang telah disiapkan tidak seluruhnya dapat direalisasikan.

Hendru mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 70 jabatan kosong di Pemkot Malang, mulai dari jabatan eselon II hingga eselon IVB. Kekosongan tersebut berdampak langsung terhadap tidak tersalurkannya berbagai komponen belanja pegawai, termasuk tunjangan jabatan.

"Sekarang saja ada sekitar 70-an jabatan kosong mulai dari eselon II sampai eselon IVB. Kalau dihitung masing-masing tunjangan jabatannya, misalnya dikalikan 14 bulan, tinggal diakumulasi saja," jelasnya.

Hendru pun mengakui apabila kekosongan jabatan tersebut belum dapat diisi sepanjang tahun 2026, maka kondisi serupa berpotensi kembali memengaruhi besaran SiLPA pada akhir tahun anggaran. "Iya, kemungkinan itu," ucapnya.

Di sisi lain, Pemkot Malang juga tengah menyiapkan langkah menghadapi ketentuan pemerintah pusat mengenai batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari postur APBD yang direncanakan berlaku pada 2027.

Hendru mengatakan, hingga kini

ketentuan tersebut masih berproses dan pemerintah daerah berharap adanya relaksasi dari pemerintah pusat. Menurutnya, apabila ketentuan batas maksimal tersebut diterapkan tanpa relaksasi, maka dapat berdampak terhadap kemampuan daerah dalam memberikan TPP.

"Karena itu kami mengajukan relaksasi, termasuk melakukan pendataan dan pemetaan jumlah pegawai yang dimiliki daerah," jelas Hendru.

Selain itu, pemerintah daerah juga masih melakukan evaluasi terkait kemampuan fiskal dalam membiayai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hendru menyebut, Pemkot Malang telah mengangkat sekitar 3.000 PPPK sebagai bagian dari penyelesaian tenaga non-ASN sesuai amanat



Plt Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono. (Santi/Lentera)

pemerintah pusat. Meski demikian, menurutnya masih terdapat 109 PPPK paruh waktu yang menjadi pekerjaan rumah Pemkot Malang.

Ia berharap seluruh PPPK paruh waktu tersebut dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada tahun ini. Namun kepastian pelaksanaannya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. (Santi/Dya)

Kota Batu Catat 47 Kasus HIV Baru di 2026



Kepala Dinkes Kota Batu, Aditya Prasaja. (foto: Dinkes Kota Batu)

BATU- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu mencatat 47 kasus baru Orang dengan HIV (ODHIV) hingga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, kelompok Lelaki Seks Lelaki (LSL) turut menyumbang temuan kasus baru.

"Dari temuan tersebut, mayoritas kasus berasal dari kategori populasi umum, sementara sebagian lainnya berasal dari kelompok populasi kunci maupun kelompok berisiko, termasuk LSL, pasien tuberkulosis (TB), pekerja seks, hingga pasangan berisiko tinggi," ujar Kepala Dinkes Kota Batu, Aditya Prasaja, dikutip pada Selasa (14/7/2026).

Disebutkannya, berdasarkan data

Dinkes Kota Batu, kategori populasi umum menjadi penyumbang terbanyak dengan 26 kasus. Selain itu, ditemukan 4 kasus pada kelompok Lelaki Seks Lelaki (LSL), 7 kasus pada pasien TB, 2 kasus pada pasangan risiko tinggi, 2 kasus pada pelanggan penaja seks, 1 kasus pada wanita penaja seks (WPS), 1 kasus pada ibu hamil, 1 kasus pada calon pengantin, serta 1 kasus lainnya merupakan irisan kategori LSL yang tercatat dalam populasi umum.

Menurut Aditya, pola persebaran kasus HIV saat ini mengalami perubahan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Kelompok populasi kunci kini tidak lagi terkonsentrasi di lokasi tertentu. Aktivitas pekerja seks maupun kelompok LGBT disebut semakin tersebar dan banyak memanfaatkan platform digital, sehingga penemuan kasus lebih banyak diperoleh melalui kegiatan skrining rutin dibanding pendekatan berbasis lokasi.

"Data kami paling banyak masuk

dalam populasi umum. Ini karena saat ini para pekerja seks tidak lagi terlokalisasi di satu tempat. Mereka menggunakan sistem online. Kelompok LGBT juga tersebar, sehingga saat skrining banyak ditemukan melalui kegiatan-kegiatan rutin," katanya.

Aditya menjelaskan, proses pelacakan terhadap kelompok populasi kunci masih menghadapi tantangan. Salah satunya karena tidak semua individu bersedia mengungkapkan perilaku seksual maupun faktor risiko yang dimiliki akibat pertimbangan psikologis dan stigma sosial.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kasus akhirnya tercatat dalam kategori populasi umum karena faktor risiko spesifiknya belum dapat diidentifikasi secara lebih mendalam.

Secara kumulatif, Dinkes Kota Batu mencatat sejak 2017 hingga Juli 2026 telah ditemukan 691 kasus ODHIV di Kota Batu. Dari jumlah tersebut, 329 pasien masih aktif menjalani pengobatan, 335 pasien berstatus gagal tindak lanjut (lost to follow up), sementara 27 pasien dilaporkan meninggal dunia.

Sementara itu, berdasarkan fasilitas kesehatan yang menemukan kasus baru sepanjang 2026, RSUD Karsa Husada Kota Batu mencatat temuan tertinggi dengan 22 kasus.

Disusul RS Bhayangkara Hasta Brata sebanyak 7 kasus, RS Baptis Batu 6 kasus, Puskesmas Bumiaji 5 kasus, Puskesmas Batu 3 kasus, Puskesmas Junrejo 2 kasus, serta Puskesmas Sisir dan RS dr. Etty Asharto masing-masing menemukan 1 kasus.

Menghadapi perkembangan tersebut, pihaknya kini memfokuskan upaya pencegahan pada edukasi kepada remaja dan pelajar, disertai skrining aktif di berbagai sektor yang dinilai memiliki potensi risiko, seperti kawasan pekerja, perkantoran, perhotelan, hingga tempat wisata.

Meski demikian, penanganan HIV tetap mengacu pada prinsip Voluntary Care and Testing (VCT). Artinya, pemeriksaan maupun pengobatan dilakukan atas dasar persetujuan sukarela dari individu yang bersangkutan. Pencegualan berlaku bagi ibu hamil dan calon pengantin yang diwajibkan menjalani pemeriksaan HIV sesuai ketentuan yang berlaku sebagai upaya mencegah penularan sejak dini. (Santi/Dya)

Tangkapan layar dari video yang dirilis militer AS pada 13 Juli, yang menurut mereka menunjukkan serangan terhadap sebuah fasilitas pemeliharaan di Bandar Abbas, Iran. (ist)

TRUMP BLOKADE IRAN LAGI, AS KENAKAN TARIF 'KEAMANAN' 20% DI HORMUZ

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan blokade terhadap Iran di Selat Hormuz. Bersamaan dengan itu, pemerintah AS mengusulkan pungutan sebesar 20 persen dari nilai kargo kapal komersial yang melintasi selat tersebut sebagai kompensasi atas biaya pengamanan jalur pelayaran.

Kebijakan tersebut diumumkan setelah Iran lebih dahulu menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dan gas dunia.

Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan Selat Hormuz harus tetap terbuka bagi pelayaran internasional dan menegaskan AS akan mengambil langkah untuk menjaga keamanan kawasan tersebut.

"Selat Hormuz terbuka dan akan tetap terbuka, dengan atau tanpa Iran. Kami kembali memberlakukan BLOKADE TERHADAP IRAN," tulis Trump.

Ia juga menyatakan Amerika Serikat akan memperoleh penggantian biaya sebesar 20 persen dari seluruh kargo yang dikirim untuk menutup biaya operasi pengamanan di kawasan tersebut.

Pernyataan serupa disampaikan Trump dalam wawancara dengan program Fox & Friends di Fox News. Menurut dia, AS berpotensi berperan sebagai pihak yang mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz.

"Kami akan menjaga selat itu dan kemungkinan akan mengelolanya. Kami akan menjadi penjaga selat tersebut. Mungkin kami akan menyebut diri kami sebagai malaikat penjaga selat. Dan kami seharusnya mendapatkan penggantian atas hal itu," ujar Trump.

Ia menambahkan bahwa negara-negara pengguna jalur tersebut dinilai

perlu ikut menanggung biaya pengamanan.

Berdasarkan harga minyak sekitar USD 80 per barel, kapal tanker berkapasitas sekitar dua juta barel diperkirakan dapat dikenai biaya

pengamanan hingga sekitar USD 30 juta atau sekitar Rp480 miliar untuk setiap pelayaran apabila skema tersebut diterapkan.

Pengumuman Washington disampaikan setelah Garda Revolusi

Iran (IRGC) menutup Selat Hormuz sejak 11 Juli 2026. Iran menyatakan penutupan dilakukan dengan alasan keamanan dan akan tetap berlaku hingga kondisi regional dinilai stabil.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menanggapi usulan tarif pengamanan AS melalui media sosial.

"Benar sekali. Siapa pun yang menyediakan jalur aman dan terjamin bagi kapal-kapal komersial melalui Selat Hormuz harus diberi kompensasi atas layanan ini."

Namun, ia menambahkan bahwa tarif 20 persen dinilai terlalu tinggi. "20 persen tentu saja terlalu banyak. Kami akan bersikap adil."

Sebelum eskalasi terbaru, Iran dilaporkan telah mengenakan pungutan hingga USD 2 juta terhadap sejumlah kapal yang melintasi wilayah tersebut.

Di sisi lain, pelaku industri pelayaran menyatakan belum memperoleh kejelasan mengenai mekanisme penerapan tarif yang diumumkan AS. Berdasarkan laporan Bloomberg, sejumlah perusahaan pelayaran mengaku belum menerima pemberitahuan resmi maupun petunjuk teknis mengenai kebijakan tersebut.

Seorang kapten kapal tanker yang melintasi kawasan itu, yang identitasnya tidak dipublikasikan karena alasan keamanan, menyebut kebijakan tersebut berpotensi membebani industri pelayaran. (tin,afp,ist/dya)

Iran Serang 2 Tanker UEA, Satu WN India Tewas



Tiga anak laki-laki bermain di perairan dangkal Selat Hormuz, sementara kepulan asap membubung akibat ledakan di latar belakang, di lepas pantai Bandar Abbas, Iran, pada hari Senin (14/6/2026). (ISNA via AP)

KONFLIK di Selat Hormuz kembali memakan korban setelah dua kapal tanker minyak milik Uni Emirat Arab (UEA) menjadi sasaran serangan rudal yang diduga dilancarkan Iran. Dalam insiden yang terjadi saat kedua kapal melintasi jalur pelayaran strategis tersebut, seorang awak kapal berkewarganegaraan India tewas dan delapan kru lainnya mengalami luka-luka.

Kementerian Pertahanan UEA menyatakan kapal tanker Very Large

B. Dari delapan korban luka, empat orang dilaporkan mengalami luka berat. Enam korban merupakan warga negara India, sedangkan dua lainnya berkewarganegaraan Ukraina.

Serangan tersebut memicu kebakaran di kedua kapal dan menyebabkan kerusakan material yang cukup signifikan.

Dalam pernyataan resminya,

Crude Carrier (VLCC) Mombasa B dan Al Bahyah, yang dioperasikan oleh ADNOC L&S, anak usaha pelayaran Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), diserang ketika melintas di jalur selatan Selat Hormuz, tepatnya di perairan teritorial Oman.

Korban meninggal merupakan awak kapal Mombasa

Kementerian Pertahanan UEA menegaskan pihaknya tidak akan mengabaikan insiden tersebut.

"UEA tetap memiliki hak penuh untuk menanggapi eskalasi ini," demikian pernyataan kementerian, Selasa (14/6/2026).

ADNOC selama ini menjadi salah satu perusahaan yang aktif mendukung operasi pemindahan minyak mentah Teluk melalui mekanisme ship-to-ship transfer (STS) di luar Selat Hormuz, sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran ekspor energi di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.

Secara terpisah, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mengakui telah menembaki dua kapal tanker super yang disebut melakukan pelanggaran saat melintasi Selat Hormuz.

Dalam pernyataannya, IRGC menuduh kapal-kapal tersebut mengabaikan peringatan berulang, mematikan sistem navigasi, serta mencoba melewati jalur yang telah dipasangi ranjau. (tin,afp,ist/dya)

Ancaman Sindrom Guillain-Barré di Balik Viralnya Konsumsi Ayam Mentah

Praktik mengonsumsi daging ayam mentah atau setengah matang kini menjadi perhatian serius otoritas kesehatan global setelah muncul sebagai tren kuliner di beberapa negara. Di Jepang, hidangan bernama chicken tataki atau torisashi-daging ayam yang hanya dipanggang secara singkat pada bagian luar sehingga bagian dalamnya tetap mentah--semakin populer dan meluas di berbagai restoran.

Fenomena ini memaksa Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang untuk menyusun pedoman resmi guna memperketat pengawasan keamanan pangan.

Selama ini, komoditas daging ayam di Jepang belum memiliki regulasi khusus yang seketat daging sapi atau babi terkait standardisasi penyajian mentah.

Melalui aturan baru yang sedang digodok, pemerintah Jepang akan mewajibkan restoran menerapkan pemisahan ruang serta alat kerja antara daging ayam yang akan dimasak dan yang akan disajikan mentah, metode sterilisasi permukaan melalui pemanggangan singkat, serta tata cara penyimpanan bersuhu rendah secara ketat.

Selain itu, pelaku usaha berskala restoran diwajibkan mencantumkan peringatan tertulis pada menu mengenai risiko kesehatan bagi konsumen. Langkah intervensi ini diambil karena prosedur higienitas di dapur sekalipun dinilai tidak mampu mengeliminasi total risiko infeksi patogen pada unggas.

Sementara itu, di ranah media digital, eksperimen individu turut memicu kontroversi. Seorang pria bernama John di Florida, Amerika Serikat, mendokumentasikan aksi bertajuk Raw Chicken Experiment, di mana ia mengonsumsi daging ayam mentah setiap hari secara berturut-turut. John berargumen bahwa daging yang ia konsumsi

aman karena berasal dari peternakan lokal dengan sistem free-range (tanpa kandang) dan diberi pakan organik bebas antibiotik serta bahan pengawet.

Namun, para pakar kesehatan masyarakat dan akademisi segera memberikan kecaman tertulis. Mereka menegaskan bahwa klaim organik atau non-antibiotik dari sebuah peternakan tidak mengubah struktur biologis serta mikroflora alami unggas yang pada dasarnya membawa bakteri patogen berbahaya.

Risiko Patogen

Dari perspektif sains dan mikrobiologi pangan, karakteristik biologis daging unggas berbeda secara signifikan dengan daging ikan atau daging sapi. Jaringan otot ayam memiliki tingkat porositas dan kelembapan yang sangat mendukung kolonisasi bakteri.

Kontaminasi bakteri pada daging ayam umumnya terjadi saat proses pemotongan, di mana isi saluran pencernaan unggas rentan mencemari permukaan daging. Ironisnya, tingkat bahaya pada daging ayam yang baru saja dipotong justru lebih tinggi karena bakteri di dalamnya masih dalam fase pertumbuhan aktif.

Dua jenis bakteri utama yang menjadi agen penyebab keracunan akut akibat konsumsi ayam mentah adalah *Campylobacter* (terutama *Campylobacter jejuni*) dan *Salmonella*. Berdasarkan data epidemiologi, paparan terhadap bakteri-bakteri ini secara langsung akan menyerang

sistem pencernaan manusia. anifestasi klinis berupa gastroenteritis akut (peradangan lambung dan usus); kram dan sakit perut yang hebat; demam tinggi di atas rata-rata; diare parah yang kerap disertai darah (disentri) dan dehidrasi tingkat tinggi akibat muntah secara terus-menerus.

Selain gangguan pencernaan akut, dampak jangka panjang yang bersifat fatal dari infeksi *Campylobacter* adalah risiko terjadinya Sindrom Guillain-Barré (GBS). Sindrom ini merupakan gangguan autoimun langka di mana sistem kekebalan tubuh manusia mengalami disorientasi pasca-infeksi, sehingga berbalik menyerang sistem saraf tepi (perifer).

Bakteri *Campylobacter jejuni* memiliki struktur dinding sel yang mirip dengan struktur saraf manusia (fenomena molecular mimicry), zat antibodi yang diproduksi tubuh untuk melawan bakteri keliru menyerang selubung mielin saraf pasien sendiri.

Kerusakan pada selubung saraf ini menyebabkan gangguan hantaran sinyal motorik yang bermanifestasi sebagai kelemahan otot secara progresif.

Dalam hitungan hari, kondisi ini dapat berkembang menjadi kelumpuhan total yang puncaknya mampu menghentikan fungsi otot-otot pernapasan, sehingga memerlukan penanganan darurat di ruang perawatan intensif (ICU) hingga n a k a n

alat bantu napas atau ventilator. Oleh karena itu, para ahli nutrisi dan praktisi medis menekankan bahwa satu-satunya prosedur standar penjaminan keamanan pangan (food safety) untuk komoditas unggas adalah proses termal atau memasak dengan benar. (ist/dya)

Rosedur Higienitas Dapur dan Penanganan Bahan

Hindari Mencuci Ayam Mentah:

Jangan mencuci daging ayam mentah di bawah air mengalir. Proses ini berisiko menyebarkan percikan air yang mengandung bakteri (*Campylobacter* dan *Salmonella*) ke area bak cuci piring, peralatan masak, dan makanan lain (kontaminasi silang).

Pemisahan Alat Potong:

Gunakan talenan dan pisau khusus untuk daging mentah. Bedakan secara mutlak dengan alat potong untuk sayuran, buah, atau makanan matang.

Sanitasi Tangan dan Alat:

Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik sebelum dan sesudah memegang ayam mentah. Segera cuci semua peralatan masak yang bersentuhan dengan daging mentah menggunakan sabun antiseptik.

Misteri Burung Perkici Buru Muncul di Dataran Tinggi Maluku Lagi



Indonesia secara global telah lama diakui sebagai salah satu titik utama biodiversitas burung dunia. Berdasarkan data keanekaragaman hayati terkini, rumah bagi avifauna ini mencatat lebih dari 1.871 spesies burung yang hidup di seluruh kepulauannya. Sebuah angka fantastis yang menempatkan Indonesia di posisi puncak, hanya sedikit di bawah kekayaan satwa Kolombia, Peru, dan Brasil.

Lebih istimewa lagi, bumi Nusantara mengantongi status

sebagai pemilik spesies burung endemis terbanyak di dunia dengan jumlah mencapai 541 spesies. Namun, status mahkota keanekaragaman hayati ini berjalan beriringan dengan tantangan konservasi yang berat, mengingat banyak dari spesies endemis tersebut kini berada dalam daftar merah satwa yang terancam punah.

Di tengah situasi kritis ini, sebuah laporan dari desk Sains dan Lingkungan Tempo membawa angin segar sekaligus melahirkan misteri baru bagi dunia ornitologi. Burung

perkici buru (atau yang secara spesifik dikenal sebagai nuri dahi-biru), salah satu satwa paling langka dan misterius di Indonesia, berhasil terdeteksi kembali eksistensinya.

Burung endemis yang sempat memicu tanda tanya besar terkait keberadaannya tersebut memunculkan diri di kawasan dataran tinggi, tepatnya di sekitar wilayah Gunung Kapalatmada, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Habitat Baru di Gunung Kapalatmada

Keberhasilan dalam mendokumentasikan serta mengonfirmasi kehadiran kembali perkici buru di habitat alaminya ini menjadi catatan penting yang menambah khazanah ilmu pengetahuan satwa nasional.

Setelah sekian lama tidak terpantau dan menyisakan spekulasi mengenai ke mana hilangnya populasi mereka, kemunculan nuri dahi-biru di Gunung Kapalatmada menjadi bukti konkret bahwa spesies ini masih bertahan di tengah tekanan perubahan ekologis.

Dokumentasi fisik yang berhasil didapatkan di lapangan kini menjadi dasar kuat bagi para peneliti untuk menyusun ulang peta persebaran satwa langka di kawasan Indonesia Timur.

Penemuan habitat perkici buru menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang spesies endemis Indonesia. Banyak hal belum terjawab. Kendati penemuan ini disambut dengan antusiasme tinggi oleh komunitas konservasi

global, terdeteksinya habitat perkici buru di wilayah dataran tinggi justru melahirkan rantai teka-teki baru bagi para pakar lingkungan.

Lokasi penemuan yang berada di area pegunungan memicu diskusi mendalam mengenai pola migrasi, adaptasi perilaku, serta preferensi ekologis dari spesies ini yang selama ini belum pernah teretakan secara sempurna oleh ilmu pengetahuan.

Misteri Perilaku

Kembalinya sang perkici di Pulau Buru memicu pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh penelitian-penelitian di masa mendatang. Ke mana saja spesies ini selama periode kehilangan kontakannya, dan mengapa mereka memilih kawasan dataran tinggi Gunung Kapalatmada sebagai benteng pertahanan terakhir?

Fenomena ini membuka dugaan adanya pergeseran habitat akibat degradasi lahan di dataran rendah, atau opsi lain bahwa dataran tinggi tersebut memang merupakan zona ekologi spesifik yang menyediakan sumber makanan serta perlindungan optimal dari predator maupun aktivitas manusia.

Bagi lembaga konservasi internasional seperti International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan otoritas lingkungan nasional, momentum penemuan kembali ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah perlindungan hukum yang agresif. Status Pulau Buru sebagai pulau yang kaya akan satwa endemis menuntut adanya zonasi wilayah konservasi yang ketat guna memastikan habitat nuri dahi-biru ini tidak terusik oleh pembukaan lahan ilegal. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I SIDOARJO: TEGUH A I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: AIS I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I TRENGGALEK: HERLAMBAH I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Monokrom hingga Eksperimen Bold, Cara Taklukkan Hijau Army

Nuansa hijau army, yang berakar dari palet militer nan earthy, kini telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pilar warna netral dalam industri mode modern. Karakter warna hijau army ini tergolong unik karena membawa impresi yang kuat, tegas, sekaligus sedikit maskulin, namun menyimpan fleksibilitas tinggi untuk diadaptasi ke berbagai spektrum gaya pakaian.

Ketimbang sekadar menjadi tren musiman yang cepat usang, hijau army bertransformasi menjadi elemen andalan bagi para pencinta mode yang mampu menawarkan kesan chic sekaligus effortless dalam satu kali padu padan, baik untuk agenda kasual hingga semi-formal.

Kunci utama dari kekuatan warna ini terletak pada kemampuannya untuk melebur bersama warna netral lain maupun berpasangan secara kontras dengan warna-warna yang berani (bold). Melalui pemilihan item fesyen yang cermat, hijau army dapat diaplikasikan sedemikian rupa untuk menciptakan siluet penampilan yang stylish tanpa harus terlihat berlebihan atau terlalu ramai.

Spektrum Putih

Eksplorasi paling aman namun tetap memberikan dampak visual yang signifikan adalah menyandingkan

hijau army dengan warna putih. Perpaduan ini secara instan melahirkan kesan yang bersih, segar, dan rapi karena karakteristik hijau army yang cenderung gelap akan terlihat lebih hidup saat menangkap kontras dari warna putih. Opsi ini menjadi pilihan utama bagi individu yang menginginkan tampilan kasual yang ringkas namun tetap terlihat terstruktur.

Dalam lanskap mode kontemporer, hijau army bertindak layaknya kanvas netral yang dinamis. Ia memiliki kemampuan unik untuk meredam warna di sekitarnya, sekaligus menjadi jangkar yang membuat warna pasangannya terlihat lebih hidup tanpa memberikan kesan berlebihan.

Sebaliknya, jika target penampilan bergeser pada impresi yang lebih tangguh dan berwibawa, warna hitam menjadi pasangan yang paling ideal. Kombinasi antara hijau army dan hitam menghasilkan estetika yang edgy, modern, dan matang. Karakter perpaduan ini sangat cocok diterapkan pada pakaian semi-formal atau busana malam, di mana pemakainya dapat memancarkan kesan elegan yang subtil tanpa harus menggunakan ornamen yang mencolok.

Palet Bumi

Kedekatan emosional hijau army dengan alam membuatnya sangat harmonis ketika dipertemukan dengan rumpun warna tanah (earth tones). Salah satunya adalah kombinasi dengan warna krem atau beige yang sukses memancarkan nuansa hangat dan kalem. Gaya kasual yang santai akan langsung naik kelas menjadi sebuah tampilan yang tampak mahal dan dikerjakan tanpa usaha

berlebih (effortless) lewat perpaduan dengan hijau army ini.

Keselarasan organik tersebut mencapai puncaknya ketika hijau army dipadukan dengan rumpun cokelat, seperti cokelat kopi tua, yang secara otomatis memperkuat kesan natural, klasik, dan mapan pada keseluruhan pakaian.

Bagi mereka yang menggemari estetika minimalis namun ingin menghindari rumpun warna cokelat, abu-abu hadir sebagai jalan keluar untuk memperlembut ketegasan hijau army.

Karakter abu-abu yang cenderung netral mampu mereduksi kesan kaku dari warna hijau army tersebut. Pilihan abu-abu muda sangat direkomendasikan untuk menciptakan impresi pakaian harian yang ringan, sedangkan penggunaan abu-abu tua dapat dipilih untuk menggeser fokus penampilan bersama hijau army ke arah yang lebih formal dan rapi.

Bold dan Playful

Kelenturan hijau army kembali diuji ketika dihadapkan pada pilihan warna yang lebih ekspresif, seperti maroon. Meski kedua warna ini memiliki saturasi yang sama-sama kuat, kombinasi keduanya justru melahirkan kontras yang elegan dan berani. Perpaduan hijau army dan maroon sangat tepat bagi mereka yang ingin menjadi pusat perhatian dalam suatu acara tanpa kehilangan sentuhan berkelas (classy).

Sebagai alternatif penutup yang tidak kalah memikat, warna mustard hadir memberikan aksan hangat yang cenderung ceria (playful). Kehadiran mustard di tengah dominasi hijau army yang pekat menciptakan kedalaman warna yang unik, modis, dan menjauhkan pemakainya dari kesan busana yang membosankan.

Tidak hanya soal tabrakan warna, keberhasilan eksperimen ini juga sangat dipengaruhi oleh permainan tekstur bahan yang digunakan. Ketika hijau army yang berkarakter maskulin diaplikasikan pada material kokoh bertekstur tegas seperti corduroy, denim, atau kanvas, perpaduannya dengan kelembutan sutra maroon atau kehangatan rajutan (knitwear) mustard akan menciptakan dimensi visual yang jauh lebih kaya. Sentuhan perbedaan tekstur ini memberikan struktur pada siluet tubuh, membuat



transisi warna yang kontras terlihat menyatu secara dinamis dan tidak monoton.

Bagi mereka yang baru ingin mencoba keluar dari zona nyaman, kunci utama dari kombinasi berani ini terletak pada formula keseimbangan proporsi. (far,ist/dya)

Arti dan Filosofi di Balik Warna Hijau Arm

Ketegasan & Kekuatan (Aura Militer):

Berakar dari seragam militer, warna ini memancarkan disiplin, stabilitas, ketangguhan mental-fisik, serta kesiapan untuk melindungi.

Kedekatan dengan Alam (Earthy):

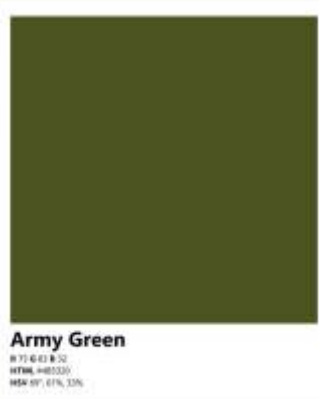
Merepresentasikan hutan lebat dan dedaunan tua yang memberikan kesan membumi, tenang, dan selaras dengan alam.

Kemandirian & Ketangguhan:

Karakter gelapnya yang tidak mencolok mencerminkan pribadi yang mandiri, tangguh, dan tidak mudah goyah.

Kemewahan yang Subtil (Quiet Elegance):

Di era modern, warna ini melambangkan keanggunan yang tenang terlihat mahal, berkelas, dan modis tanpa harus tampil berlebihan.



NAMA GUS MIFTAH,...DARI HAL 1

Nama pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (13/7), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan adanya aliran dana sebesar Rp100 juta yang disebut diberikan kepada Gus Miftah.

Hingga kini, penyebutan nama tersebut masih merupakan fakta yang terungkap di persidangan dan belum menjadi putusan pengadilan maupun kesimpulan hukum.

Nama Gus Miftah muncul ketika jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sekaligus mengonfirmasi keterangannya kepada mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Jalur Ganda Solo-Semarang (JGSS), Dheky Martin, yang dihadirkan sebagai saksi. Dalam BAP tersebut, jaksa membacakan daftar pihak yang disebut menerima aliran dana proyek, termasuk nama Gus Miftah dengan nominal Rp100 juta.

Saat mengonfirmasi identitas penerima dana, jaksa bertanya kepada saksi, "Gus Miftah itu yang kemarin ramai gara-gara penjudial?"

Dheky menjawab, "Iya." Jaksa kemudian kembali menegaskan, "Dia juga dapat duit itu Rp100 juta. Supaya orang tahu, supaya orang di Pati juga tahu. Gus Miftah yang rambutnya gondrong dapat duit dari bapak (Dheky) dari duit proyek supaya orang tahu." Dheky tidak membantah isi BAP maupun pernyataan yang dibacakan jaksa tersebut.

Selain mengonfirmasi dugaan aliran dana kepada Gus Miftah, jaksa juga mendalami keterangan Dheky mengenai distribusi uang proyek kepada sejumlah pihak. Keterangan itu menjadi bagian dari pembuktian perkara dugaan korupsi pembangunan jalur ganda kereta api Solo-Semarang yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo sebagai terdakwa.

Dalam persidangan yang sama, jaksa juga menggali keterangan mengenai kedatangan Nur Hidayat ke kantor proyek JGSS. Menurut Dheky, Nur Hidayat datang untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan keinginannya agar dapat ikut terlibat dalam proyek tersebut.

"Yang saya tahu, pertama kali tamu yang datang ke kantor adalah Pak Nur Hidayat. Beliau menyatakan ingin turut serta dalam pembangunan proyek JGSS 1," ujar Dheky.

Namun, Dheky mengaku tidak dapat memenuhi keinginan tersebut

karena proyek telah memiliki pemenang tender. Ia kemudian mengarahkan Nur Hidayat untuk berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana, Feri Septa alias Gareng.

Dalam keterangannya, Dheky juga mengungkapkan bahwa Nur Hidayat sempat mengaku bekerja bersama Sudewo.

"Waktu itu sempat mengatakan, saya kerja dengan Pak Sudewo sekarang," ungkap Dheky.

Sudewo Mengaku Tak Tahu

Usai persidangan, terdakwa Sudewo mengaku tidak mengetahui dugaan aliran dana Rp100 juta yang disebut mengalir kepada Gus Miftah. Menurutnya, ia tidak memahami persoalan tersebut.

"Saya enggak paham. Kalau itu enggak paham. Enggak tahu," kata Sudewo kepada wartawan usai sidang.

Saat kembali ditanya mengenai penyebutan nama Gus Miftah dalam persidangan, Sudewo memilih tidak memberikan komentar lebih jauh.

"Saya enggak bisa komentar apa-apa, terima kasih," ujarnya singkat.

Sementara itu, Jaksa KPK Greafik Loserte menyatakan keterangan saksi Dheky memberikan petunjuk mengenai dugaan aliran dana hasil korupsi yang mengalir kepada sejumlah pihak.

"Kami mendapatkan keterangan yang cukup terang benderang dari

saksi Dheky. Selaku PPK dia menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Dari sana kami mendapat informasi uang-uang itu beredar sampai jauh, salah satunya kepada Gus Miftah sebesar Rp100 juta," ujar Greafik.

Meski demikian, Greafik menegaskan seluruh informasi tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan.

KPK Janji Dalam

Menanggapi munculnya nama Gus Miftah dalam persidangan, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami seluruh fakta hukum yang terungkap di ruang sidang. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan saksi maupun barang bukti yang disampaikan di persidangan akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum sebagai dasar menentukan langkah hukum berikutnya.

"Ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti dianalisis oleh JPU," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/7). Menurut Budi, pendalaman akan difokuskan pada asal-usul, tujuan, dan motif dugaan pemberian uang tersebut, termasuk keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidangkan. Apabila dalam proses penyidikan lanjutan diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang namanya muncul dalam persidangan,

penyidik KPK memiliki kewenangan untuk memanggil mereka sebagai saksi.

Namun hingga kini, KPK belum mengumumkan adanya jadwal pemeriksaan terhadap Gus Miftah.

KPK juga membuka kemungkinan menelusuri hingga menyita dana tersebut apabila nantinya terbukti berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

"Tentunya terbuka kemungkinan jika memang itu nanti terbukti bahwa uang tersebut terkait ataupun bersumber dari uang-uang hasil dugaan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang berproses di persidangan," ujar Budi.

Perkara yang kini bergulir di Pengadilan Tipikor Semarang merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam dakwaan, Sudewo diduga menerima fee sebesar 0,5 persen dari nilai proyek pembangunan jalur ganda Solo-Semarang yang bernilai sekitar Rp143 miliar hingga Rp144 miliar. Nilai fee yang diduga diterima mencapai sekitar Rp721,5 juta. Selain perkara korupsi proyek DJKA, Sudewo juga didakwa dalam perkara lain terkait dugaan pemerasan dan suap jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. (wid,rls,kum,ist/dya)

Bos Rokok HS Disebut Terima Rp9,5 Miliar

PERSIDANGAN dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan juga mengungkap dugaan aliran dana ke pengusaha rokok HS, Muhammad Suryo, disebut menerima "sleeping fee" sebesar Rp9,5 miliar yang diduga bersumber dari proyek Jalur Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso (JGSS) 6.

Fakta tersebut terungkap dari keterangan Bernard Hasibuan, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, yang dihadirkan sebagai saksi. Dalam persidangan, Bernard mengungkapkan Muhammad Suryo diduga memperoleh pembayaran senilai Rp9,5 miliar dari rencana keseluruhan sebesar Rp11 miliar.

"Setahu saya untuk Suryo Rp9,5 miliar dari rencana Rp11 miliar," ujar Bernard di hadapan majelis hakim.

Menurut Bernard, uang tersebut diberikan dalam bentuk sleeping fee, yakni kompensasi kepada pihak yang tidak lagi mengerjakan proyek meski sebelumnya dipersiapkan untuk

terlibat. Ia menyebut pembayaran itu berkaitan dengan "urusan keamanan", namun mengaku tidak mengetahui secara pasti maksud maupun peran Muhammad Suryo dalam konteks tersebut.

Perkara ini berkaitan dengan proyek pembangunan Jalur Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso (JGSS) 6 yang menjadi salah satu proyek di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam persidangan sebelumnya terungkap bahwa proyek tersebut semula dipersiapkan untuk dikerjakan perusahaan yang dikaitkan dengan Muhammad Suryo. Namun, karena perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, pekerjaan akhirnya dialihkan kepada PT Istana Putra Agung milik Dion Renato Sugiarto.

Meski demikian, menurut kesaksian yang terungkap di persidangan, setelah pengalihan proyek tersebut Muhammad Suryo tetap diduga menerima pembayaran dalam bentuk sleeping fee. Keterangan serupa juga pernah muncul dalam persidangan terdakwa

Dion Renato Sugiarto dan kembali ditekankan dalam sidang terbaru.

Kasus dugaan korupsi proyek DJKA sendiri merupakan pengembangan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023. Penyidikan kemudian berkembang hingga mencakup sejumlah proyek pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalur kereta api di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.

Muhammad Suryo dikenal sebagai pengusaha yang mengembangkan merek rokok HS. Pria kelahiran 1984 asal Lampung itu membangun usaha rokok HS di Muntilan, Magelang, pada 2024. Dalam waktu relatif singkat, merek tersebut berkembang pesat dengan kapasitas produksi yang disebut mencapai sekitar lima juta batang per hari dan mempekerjakan ribuan pekerja. Di bawah Surya Group Holding Company, ia juga mengembangkan bisnis di sektor properti, minyak dan gas, hingga maskapai penerbangan. (wid,rls,tir/dya)

Pola Berulang di Balik Bom Sekolah PETAKA LEDAKAN DI MAN 3 PADANG USAI TEROR SDN SRENGSENS

Hanya sehari setelah ancaman bom mengguncang SDN Srengsens Sawah 15, Jakarta Selatan, ledakan bom rakitan benar-benar terjadi di lingkungan sekolah. Pada Selasa (14/7/2026) sekitar pukul 10.15 WIB, sebuah bom rakitan meledak di ruang kelas MAN 3 Kota Padang, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Sumatera Barat. Bahan peledak tersebut disimpan di dalam laci meja salah seorang siswa dan menimbulkan kepanikan di lingkungan sekolah. Beruntung, insiden itu tidak menyebabkan korban jiwa. Aparat kepolisian yang bergerak cepat juga berhasil mengamankan satu bom rakitan lain yang masih utuh sebelum digunakan.

Peristiwa di Padang terjadi hanya sehari setelah polisi menangani ancaman bom terhadap SDN Srengsens Sawah 15 Jakarta Selatan. Seorang pria berinisial MY (34) diketahui mengirimkan ancaman bom massal melalui WhatsApp pada hari pertama masuk sekolah. Meski ancaman tersebut tidak berujung ledakan, kasus itu menjadi pengingat bahwa lingkungan pendidikan mulai menghadapi bentuk ancaman keamanan yang semakin beragam.

Di MAN 3 Kota Padang, penyelidikan kepolisian kemudian mengarah kepada seorang siswa kelas XII berinisial R. Polisi mengamankan pelaku bersama sejumlah barang bukti, antara lain satu bom rakitan yang belum meledak, ketapel, dan



kelereng yang diduga dapat digunakan sebagai proyektil.

Kapolresta Padang Kombes Pol. Apri Wibowo mengatakan, berdasarkan pemeriksaan awal, aksi

tersebut diduga dipicu oleh dendam akibat perundungan yang dialami pelaku.

"Setelah kami lakukan pemeriksaan, anak tersebut mengaku

melakukan perbuatannya karena menyimpan rasa dendam akibat sering menjadi korban bullying oleh teman-temannya," ujar Apri.

Menurut kepolisian, pelaku mengaku mengalami perundungan sejak masih kecil dengan pelaku yang berbeda-beda. Tekanan tersebut disebut terus berlanjut hingga ia duduk di bangku kelas IX.

Polisi menduga bom rakitan itu sengaja dibuat untuk menyasar orang-orang yang dianggap pelaku sebagai pihak yang melakukan perundungan terhadap dirinya.

"Bom rakitan itu diduga sengaja diledakkan untuk mencelakai temannya yang sering membully dirinya," kata Apri.

Dari hasil pemeriksaan sementara, satu bom rakitan telah meledak, sementara satu lainnya berhasil diamankan dalam kondisi utuh.

"Yang sudah meledak ada satu, sedangkan satu lainnya masih utuh. Untuk sementara kami mengidentifikasi benda tersebut sebagai bom rakitan, namun akan kami telusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan mendalam," ujar Apri.

Dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa kemampuan merakit bahan peledak diperoleh pelaku secara mandiri melalui internet. Pelaku diduga mempelajari cara pembuatan bom dari berbagai sumber digital.

"Dia mempelajari lewat internet, YouTube, kita mempelajari seperti itu," kata Apri.

Fenomena tersebut menunjukkan tantangan baru dalam pencegahan aksi kekerasan di lingkungan pendidikan. Ruang digital tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga dapat menjadi tempat seseorang memperoleh informasi yang berpotensi disalahgunakan.

Tragedi yang menimpa MAN 3 Kota Padang merupakan alarm keras yang memperpanjang daftar hitam terorisme berbasis sekolah di Indonesia. Sebelum ledakan bom rakitan terjadi di SMAN 72 Jakarta pada November 2025, ancaman teror terhadap sekolah telah lebih dahulu muncul dalam bentuk ancaman digital.

Pada Oktober 2025, sejumlah sekolah internasional di Jakarta menjadi sasaran teror bom bermodus pemerasan. Salah satunya Jakarta Nanyang School yang menerima pesan ancaman melalui WhatsApp dan surat elektronik (e-mail).

Dalam pesan tersebut, pelaku meminta uang tebusan sebesar 30.000 dolar AS dalam bentuk Bitcoin. Kepolisian kemudian melakukan sterilisasi dan pemeriksaan di lokasi, namun tidak menemukan bahan peledak. Ancaman tersebut akhirnya dinyatakan tidak terbukti. (wid,rls,ist/dya)

Pengamat: Kelompok Radikal Manfaatkan Medsos untuk Rekrut Anak yang Rentan

hukum pidana yang baru layaknya barang oplosan.

"Meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHP lama dan KUHP baru, maka itu namanya 'dioplos'. Karena putusannya seperti ini, maka saya pakai baju oplos," ujar Roy kepada awak media usai persidangan. Meski melontarkan kritik keras terhadap regulasi yang tumpang tindih, Roy tetap mengapresiasi putusan hakim tunggal PN Jakarta Selatan.

Dalam putusannya, hakim mengabulkan permohonan Roy dan secara resmi menyatakan bahwa proses penangkapan, penahanan, serta penggeledahan terhadap dirinya tidak sah secara hukum dan batal demi hukum.

Kemenangan ini tak menyurutkan langkah perlawanan Roy Suryo. Pihaknya menyatakan menolak segala

bentuk kompromi atau restorative justice dan sedang menyiapkan manuver hukum balasan.

Di sisi lain, Majelis hakim menolak permohonan praperadilan Roy Suryo yang meminta agar penetapan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak sah.

Dengan penolakan tersebut, majelis hakim menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya kepada Roy Suryo dalam kasus pencemaran nama baik terkait ijazah palsu Jokowi sah secara hukum.

Keputusan tersebut dibacakan majelis hakim tunggal, I Ketut Darpawan, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Ragunan, Selasa (7/7/2026). ist,tin,ini/dya

Personel Brimob Polda Sumatera Barat berjaga di lokasi ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan di MAN 3 Kota Padang, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Selasa (14/07/2026).ist



ROY SURYO tampak memamerkan kaus dengan tulisan "PASTI DI OPLOS!" sesaat setelah dia memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026). Menurutnya, tulisan di kausnya itu merupakan bentuk sindiran tajam terhadap sistem peradilan transisi di Indonesia.

Roy menilai penegakan hukum saat ini sedang berada dalam fase "laboratorium" yang semrawut karena aparat penegak hukum mencampurkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lama dengan instrumen